

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Pemuda dan Olahraga Tidak Resmi Undang-Undang No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pedoman Olahraga Negara Provinsi Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkumpulan dan Tata Kerja Dinas Kepala Daerah Kota Bandung Pedoman Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pencitraan Kewajiban Prinsip, Kapasitas dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga.

Cabang Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang ditempati oleh Pemuda dan Olahraga. Tempat Kerja Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan berbagai senam pemerintah provinsi di bidang kepemudaan dan olah raga yang diberikan oleh Pejabat. Penilaian pelaksanaan adalah interaksi di mana komitmen pekerja terhadap asosiasi dievaluasi dalam periode tertentu. Sedangkan penggambaran kewajiban pokok dan unsur-unsur Pembantu tergantung pada Peraturan Ketua Umum Kota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pokok, Kapasitas, Kumpulan Harapan dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung. Berdasarkan pedoman ketuanya, maka disain kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung. mempunyai keadaan sebagai komponen pelaksana Pemerintah Daerah Bandung di bidang Pemuda dan Olahraga.

Dalam menyelesaikan tugas pokoknya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung mempunyai kapasitas sebagai pendamping: memimpin, mengelola, merencanakan, membina, mengendalikan, mengatur dan merepresentasikan strategi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, pelaksanaan administrasi khusus manajerial, pelaksanaan

tugas yang berbeda yang ditunjuk oleh Ketua sesuai dengan kewajiban dan kapasitas. Penyelidikan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pegawai Negeri, Penyajian Organisasi Pemerintahan merupakan penggambaran derajat pencapaian maksud atau tujuan jabatan pemerintahan sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana pokok pemerintahan. kantor yang menunjukkan tingkat kemajuan dan kekecewaan dalam melaksanakan latihan sesuai program. juga, strategi yang khas. Signifikansi perbaikan eksekusi yang representatif harus diselesaikan dengan cara yang tertata dan praktis, sehingga kemajuan eksekusi pekerja dapat dilakukan dengan tepat, program peningkatan eksekusi pekerja harus terlebih dahulu disiapkan.

Proyek peningkatan pelaksanaan perwakilan harus diatur dengan susah payah dan bergantung pada strategi dan aturan logis pada kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini, seperti yang dibutuhkan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung saat ini dan nanti. Pertama dan terpenting, hanya area bisnis lokal yang benar-benar memahami pentingnya bantuan yang baik kepada klien. Bagi dunia bisnis, administrasi adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan dari kliennya. Mereka memahami bahwa ketahanan bisnis bergantung pada klien. Kepercayaan dan hubungan yang nyaman dengan klien harus didorong melalui latihan bantuan yang dapat mengatasi masalah mereka, sehingga dunia bisnis dicapai untuk bersaing dalam menumbuhkan administrasi kedudukan tertinggi secara progresif.

Di lingkungan pemerintahan, pemahaman tentang kualitas administrasi mulai tercipta sejak tahun 1980-an. Perhatian ini dipicu oleh cara yang membantu latihan untuk daerah lokal akhirnya menjadi mahal, dalam hal apapun, berkembang selangkah demi selangkah, namun selalu tidak dapat menciptakan hasil yang benar, baik individu yang dilayani dan otoritas publik sebagai otoritas. pengangkutan administrasi juga bingung, karena bantuan pemerintah secara umum masih jauh dari asumsi. Kegagalan ini dengan demikian mendorong semua pertemuan untuk mulai

mengarahkan evaluasi dan penilaian menyeluruh terhadap kerangka administrasi wilayah setempat. Menurut orang-orang pada umumnya, organisasi pendukung wajib pajak dirasa jauh dari yang terbesar, bias, tercemar, sistem aturan mayoritas yang kurang, keterusterangan yang kurang, dan tidak dapat diandalkan. Sebagai sebuah keajaiban di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, tidak ada perwakilan yang membutuhkan kedisiplinan dalam jam kerjanya, misalnya merokok pada jam kerja, pekerja yang sering pulang pergi tidak sesuai dengan waktu bekerja. berjam-jam, sehingga mereka tidak dapat menambah waktu mereka dengan sukses dan efektif.

Investigasi awal dari pengaturan pemerintah dibuat melihat yang masih digambarkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, dengan tekanan yang meluas dari daerah setempat, otoritas publik mulai perlu belajar, menyimak, dan mencari cara untuk memahami kerinduan mereka. Sampai saat ini, otoritas publik benar-benar memahami bahwa tujuan pasti dari administrasi adalah untuk membuat permintaan kehidupan daerah setempat yang dapat menangani semua masalah mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, otoritas publik telah melakukan langkah-langkah yang berbeda di semua tempat kerja termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, seperti memperluas keterusterangan, tanggung jawab, dan menghancurkan martabat. Otoritas publik menunjukkan sikap yang intens terhadap perbaikan administrasi di daerah setempat dan upaya yang dilakukan dalam mengalahkannya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pekerja seperti variabel yang mengganggu pencapaian presentasi perwakilan ini.

Memperkirakan dan meningkatkan pelaksanaan akan berdampak pada perluasan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap instansi pemerintahan perlu membangun Penanda Pelaksana Prinsip (IKU). Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh organisasi pemerintah adalah mencari tahu apa yang akan menjadi presentasi mendasar dari kantor otoritas publik yang

bersangkutan. Sejalan dengan itu, pelaksanaan prinsip dituangkan dalam tujuan dan tujuan penting organisasi pemerintah, dengan tujuan agar IKU menjadi proporsi pencapaian kepala tingkat dan sasaran penting dari kantor-kantor pemerintah. Secara keseluruhan, IKU digunakan sebagai bagian dari pencapaian badan publik yang bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan tanggung jawab, Dispora Kota Bandung juga mengaudit Penanda Pelaksanaan Prinsip dan diselesaikan berdasarkan Pengumuman Pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung. Nomor: 050/119-Dispora tentang Penjaminan Penanda Pelaksana Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, dalam mengarahkan survei dengan menitikberatkan pada pencapaian pelaksanaan, isu-isu dan isu-isu kunci yang sangat mempengaruhi pencapaian suatu perkumpulan. Hasil pendugaan penanda presentasi fundamental Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dinas Pemuda dan Olahraga (dispora) Kota Bandung

		REALISASI			
No.	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL	%	SISA ANGGARAN
1.	Program Pelyanan Admnistrasi Perkantoran	12.537.637.399,-	9.523.941.747,-	75,96	3.013.695.652,-
2.	Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.074.600.000,-	3.765.207.893,-	92,41	309.392.107,-
3.	Program Peningkatan disiplin aparatur	300.725.000,-	213.263.800,-	70,92	87.461.200,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	898.025.000,-	728.075.000,-	81,08	169.950.000,-

5.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.907.600.000,-	1.753.489.400,-	91,92	154.110.600,-
6.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	2.117.500.000,-	1,790.650.220,-	84,56	326.849.780,-
7.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	13.327.300.000,-	10.440.432.063,-	78,34	2.886.867.937,-
8.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda	6.509.100.000,-	4.601.257.449,-	70,69	1.907.842.551,-
9.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	2.773.600.000,-	1.346.560.050,-	48,55	1.427.039.950,-
10.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	547.979.000,-	343.560.600,-	62,70	204.418.400,-
11.	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga	24.555.379.362,-	22.006.275.002,-	89,62	2.549.104.360,-
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	62.916.585.500,-	57.786.003.588,-	91,85	5.130.581.912,-
	JUMLAH	139.067.826.261	115.035.498.537	82,72	24.032.327.724

Catatan: Data realisasi kinerja Dispora Kota Bandung Tahun 2018 Lakip Tahun 2018.

Laporan Pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung 2018 ini merupakan tugas tersusun mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Administrasi Agung) Tata Kota Bandung (Dispora) Kota Bandung tahun 2018. Menjadikan LKIP merupakan tahapan yang

baik dalam menghimpun para Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung. Asumsi Pedoman Resmi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyajian Tanggung Jawab Aparat Pemerintah (LKIP). Sebagai upaya untuk administrasi besar yang dibentuk oleh semua pertemuan.

LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung tahun 2018 dapat menggambarkan presentasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (dispora) Kota Bandung dan penilaian atas pameran yang telah terlaksana baik sebagai eksekusi aksi maupun eksekusi target, sama seperti ujian pelaksanaan yang mencerminkan prestasi dan kekecewaan. .

Pada tahun 2018 ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung menetapkan 7 (tujuh) fokus dengan 9 (sembilan) penanda pelaksanaan sesuai Rencana Penyajian Tahunan dan Arsip Penjaminan Pameran 2018 yang harus diselesaikan. Secara rinci pencapaian target dapat diperjelas sebagai berikut:

- 1 Target yang Melampaui: 5 petunjuk eksekusi
- 2 Tujuan yang Dicapai: 2 petunjuk eksekusi
- 3 Tidak Dicapai: 2 petunjuk eksekusi

Estimasi marka dalam mencapai target pelaksanaan diselesaikan secara sengaja dan tertata sesuai dengan informasi yang dimiliki sehingga menjunjung tinggi legitimasi informasi dalam mencapai target dan target sehingga pencapaian target dapat terwakili. Pada umumnya, telah mencapai nilai di kisaran > 85 - 100 yang diingat untuk Terjemahan yang menyenangkan di Tahun Moneter 2018 untuk pelaksanaan proyek dan latihan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung untuk menyelesaikan pameran target yang direncanakan melalui rencana Penghasilan dan Penggunaan Teritorial. (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 dengan atap belanja Rp. 139.067.826.261, - dengan rencana keuangan Rp. 115.035.498.537, - telah

berhasil menyelesaikan pencapaian pelaksanaan untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Organisasi Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung. Dilihat dari ciri Atap Penataan Pokok untuk ukuran rencana keuangan, maka pengakuan belanja yang telah dimanfaatkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung sebesar 82,72% dari rencana belanja demonstratif yang tersusun, hal ini menunjukkan bahwa penataan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung belum cukup ideal dalam tujuan-tujuan tertentu belum tercapai sehingga mempengaruhi perluasan kerja secara efektif dan efektif.

Eksekusi perwakilan semakin signifikan karena permintaan pekerjaan atau posisi, karena kemajuan mekanis dan persaingan yang semakin ekstrem di antara organisasi sejenis. Setiap staf organisasi dituntut memiliki pilihan untuk bekerja secara layak, produktif, kualitas dan jumlah pekerjaannya dapat diterima dengan tujuan agar intensitas organisasi semakin besar sesuai dengan situasi di Dispora Kota Bandung. Pada dasarnya, ide eksekusi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu penilaian eksekusi pekerja individu dan penilaian eksekusi hierarkis. Poin-poin penilaian presentasi yang digunakan adalah untuk memperbaiki atau mengupgrade pameran suatu asosiasi atau kantor dengan memperluas pameran para pekerjanya. Mengingat keajaiban informasi, pencipta menganggapnya penting untuk dilakukan juga penelitian tentang penilaian pelaksanaan dalam judul teori:

**“EVALUASI KINERJA PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA (DISPORA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018.”**

2. Identifikasi Masalah

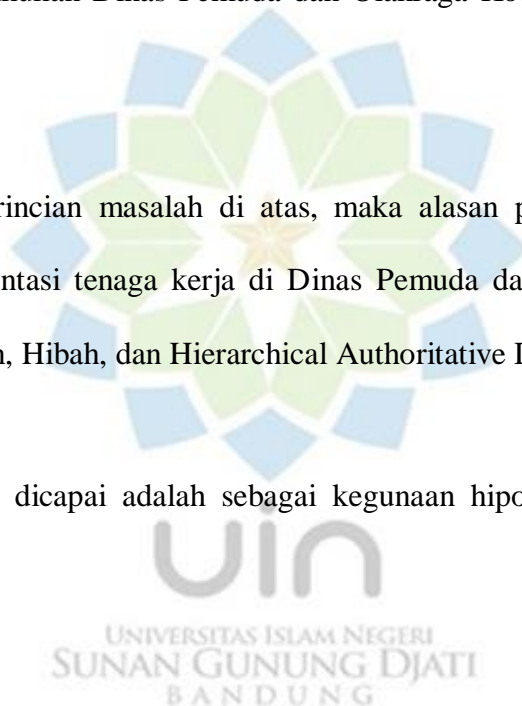
Berdasarkan dasar dari permasalahan diatas, maka ilmuwan dapat mengenali permasalahan dalam investigasi ini sebagai berikut:

1. Belum ideal pelaksanaan pekerja unit pelaksana khusus sehingga pencapaian target yang ditetapkan oleh Dispora Kota Bandung belum tercapai.
2. Staf dan yayasan yang dibatasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung.
3. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana Pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dilihat dari aspek Kepemimpinan, Sumber Daya, dan Penghargaan?
 2. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung terkait evaluasi kinerja pegawai?
4. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perincian masalah di atas, maka alasan penelitian ini adalah untuk menentukan penilaian presentasi tenaga kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, Aset, Kewenangan, Hibah, dan Hierarchical Authoritative Design.
5. Kegunaan Penelitian

Keuntungan yang harus dicapai adalah sebagai kegunaan hipotetis dan berguna, sebagai berikut:

 3. Kegunaan hipotetis
 - a) Kegunaan ujian bagi penulis esai adalah untuk mengaplikasikan informasi atau spekulasi dan memberikan pengetahuan bagi kemajuan ilmu implementasi Kebijakan, khususnya yang diidentikkan dengan Masyarakat pada umumnya.
 4. Pekerjaan yang Layak
 - a) Untuk ilmuwan yang berbeda



Eksplorasi ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada spesialis yang berbeda dalam mengarahkan pemeriksaan lebih lanjut seperti eksplorasi ini dalam kepentingan yang lebih luas.

b) Untuk Organisasi

Ujian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangsih bagi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung sehingga cenderung dimanfaatkan sebagai bahan pemikiran untuk meningkatkan penyajian perkantoran khususnya di bidang organisasi.

c) Untuk pencipta

Eksplorasi ini dapat menambah wawasan, khususnya tentang penilaian presentasi perwakilan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung.

6. Kerangka Pemikiran

Menurut (Wirawan, 2012) unsur-unsur evaluasi kinerja yang efektif dan efisien meliputi sebagai berikut :

1. Relevansi

Penilaian kinerja harus sesuai. Dengan kata lain, harus melibatkan banyak faktor. Harus dikaitkan dengan tujuan dan disesuaikan pula dengan tujuan yang ingin diperoleh organisasi. Kedua, kriteria kinerja harus berhubungan dengan pencapaian strategi perusahaan. Sebagai ukuran kinerja, ukuran kinerja karyawan harus dikaitkan dengan tujuan organisasi.

a) Reliabilitas

berarti konsistensi evaluasi kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja dikatakan kredibel atau kredibel jika seorang pegawai dievaluasi oleh dua orang independen dan tidak memiliki nilai yang sama atau sangat berbeda.

b) Sensitivitas

Penilaian kinerja harus sensitif, artinya dapat membedakan kinerja sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk.

c) Akseptabilitas

Penilaian kinerja harus akseptabel, berarti mampu diterima oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan evaluasi suatu kinerja.

d) Praktikal

Penilaian kinerja harus praktis berarti Mudah bagi atasan untuk memahami dan menerapkan.

Apakah evaluasi kinerja itu praktis atau tidak dinilai dengan kriteria berikut :

- i. *Sederhana*. Penilaian dalam evaluasi kinerja harus sederhana, mudah dipahami oleh semua karyawan.
- ii. *Tidak memerlukan waktu yang banyak (time consuming)*. Implementasi pengukuran kinerja tidak memakan waktu lama setelah implementasi pemantauan kinerja dievaluasi.
- iii. *Tidak beresiko tinggi*. Risiko dalam menilai efektivitas antara lain subjektifitas dan kesalahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, risiko dapat muncul karena pengukuran kinerja menciptakan konflik antara evaluator dan evaluasi.

Tidak Melanggar peraturan UU Meskipun evaluasi atau penilaian kinerja sepenuhnya merupakan kebijakan atau elemen organisasi atau perusahaan, organisasi memutuskan untuk merancang dan melakukan evaluasi yang tidak bertentangan dengan Hukum.